

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN BELITANG DALAM  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

KAUSAR ADITYA  
NPP. 31.0223

*Program Studi Politik Indonesia Terapan Fakultas Politik Pemerintahan*  
email : gileocang@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Maichel Wutoy, M.M.

**ABSTRACT**

**Background (GAP):** The primary objective is to determine the level of political participation of the community in Belitang District and to evaluate the steps taken by the KPUD of East OKU Regency to enhance political engagement in the 2020 elections. **Objective:** The primary objective is to determine the level of political participation of the community in Belitang District and to evaluate the steps taken by the KPUD of East OKU Regency to enhance political engagement in the 2020 elections. **Method:** The research employs a qualitative descriptive method with purposive sampling techniques. Data collection involved interviews, observations, and documentation. Data analysis was performed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Results/Findings:** The study reveals that the level of political participation in Belitang District during the election of the Regent and Vice Regent of East OKU Regency is influenced by factors such as social status, economic status, political awareness, and trust in the government, as outlined by Ramlan Surbakti's theory. Participation is affected by the varying levels of political awareness and trust among the community. The KPUD of East OKU Regency made significant efforts to increase political participation, including implementing health protocols, ensuring infrastructure completeness, and conducting thorough socialization during the pandemic. These efforts resulted in improved political participation and heightened political awareness in Belitang District. **Conclusion:** The KPUD's initiatives were effective in enhancing community political participation in the 2020 elections. Future recommendations for the KPUD of East OKU Regency include maintaining consistent efforts to increase political participation through continuous political education and community motivation for the 2024 elections.

**Keywords:** Political Participation, KPUD, Community, Pemilukada

**ABSTRAK**

**Latar Belakang (GAP):** Penulisan ini dilaksanakan di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, bertujuan untuk memahami tingkat partisipasi politik masyarakat di daerah tersebut. Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara partisipasi politik yang diharapkan dan yang terjadi serta efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten OKU

Timur dalam meningkatkan partisipasi politik. **Tujuan:** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Belitang dan mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh KPUD Kabupaten OKU Timur dalam meningkatkan partisipasi politik di wilayah tersebut pada pemilukada tahun 2020. **Metode:** Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik sampel purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Belitang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Timur dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status sosial, status ekonomi, kesadaran politik, dan kepercayaan terhadap pemerintah, sesuai dengan teori Ramlan Surbakti. Partisipasi masyarakat dalam pemilukada tahun 2020 dipengaruhi oleh berbagai alasan, mulai dari kesadaran politik hingga rasa kepercayaan kepada kandidat atau pemerintah. KPUD Kabupaten OKU Timur telah melakukan upaya yang baik dalam meningkatkan partisipasi politik, termasuk menerapkan protokol kesehatan, melengkapi sarana prasarana, dan melakukan sosialisasi dengan baik. Tingkat kesadaran politik masyarakat Kecamatan Belitang juga semakin maju. **Kesimpulan:** Upaya KPUD Kabupaten OKU Timur terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada tahun 2020. Saran untuk KPUD Kabupaten OKU Timur ke depan adalah tetap konsisten dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan memberikan pendidikan politik dan memotivasi masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilukada.

**Kata Kunci:** Partisipasi Politik, KPUD, Masyarakat, Pemilukada Pengelolaan, Keuangan, Dana Desa

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah merupakan alat pelaksana kedaulatan rakyat Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum kepala daerah, namun tahapan demokrasi sebelumnya belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Seiring dengan perubahan zaman, Indonesia mengalami perkembangan demokrasi yang ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta keterbukaan bagi semua warga negara, termasuk pelaksanaan pemilu dan pilkada (Sari sasi gendro, 2022).

Demokrasi secara umum diartikan sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, "demokratia," yang berarti kekuasaan rakyat. "Demokratia" terdiri dari dua kata, "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti kekuasaan. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan demikian, UUD 1945 menegaskan dasar pemerintahan demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat (L. M. A. Sa'ban & Wijaya, 2018).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA). Pemilukada pertama kali diselenggarakan pada Juni 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau Kabupaten/Kota

dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Salah satu penyelenggara kegiatan politik di Indonesia adalah KPU, yang merupakan lembaga independen negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dengan tugas menyelenggarakan pemilu dan pilkada di Indonesia (Asdar Mknung & Muhammad Ma'ruf, 2022).

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokrasi di daerah. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon kepala daerah dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan syarat tertentu, atau dari pasangan calon perseorangan dengan syarat tertentu pula.

Pemilihan kepala daerah secara langsung seharusnya dapat membawa perubahan berarti bagi daerah dan mewujudkan prinsip otonomi daerah, dimana setiap tingkatan daerah berhak menentukan kebijakannya dan menjalankan pemerintahannya. Ini merupakan wujud kedaulatan rakyat yang menjadi esensi demokrasi. Esensi ini seharusnya disambut baik oleh masyarakat dengan kesadaran dan kecerdasan dalam menggunakan hak politiknya. Partisipasi aktif, cermat, dan jeli menjadi wujud kesadaran politik yang harus dimiliki oleh masyarakat dalam pemilukada. Tujuan lain dari pemilukada adalah untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat serta menciptakan demokrasi di tengah masyarakat.

Harapan besar dengan terselenggaranya pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah agar masyarakat dapat memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, sehingga hal ini menjadi pendidikan politik dan wawasan politik yang lebih dewasa, terutama dalam partisipasi masyarakat dalam hubungan struktur pemerintahan dan antar pemerintah daerah. Dengan demikian, masyarakat di daerah menjadi lebih paham tentang politik, meningkatkan kesadaran berpolitik, lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah, serta memilih secara bebas tanpa adanya tekanan, intimidasi, kekerasan politik, atau penekanan melalui jalur birokrasi.

Peran masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah didasari pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon kepala daerah dan rekam jejak calon tersebut. Penggunaan hak suara dalam pemilihan kepala daerah sangat menentukan perkembangan suatu daerah. Namun, ketika penggunaan hak suara masyarakat rendah, hasil pemilukada tersebut bisa dianggap kurang legitimate. KPU harus berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara dalam pemilihan kepala daerah tentu berdampak positif pada proses pembangunan daerah, yang selanjutnya akan mendorong kemajuan di berbagai aspek kehidupan di daerah tersebut. Oleh karena itu, perhatian terhadap penggunaan hak suara masyarakat dalam pemilihan kepala daerah menjadi sangat penting.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pemerintah pusat menjadikan pemilihan kepala daerah sebagai instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan atau kedaulatan dalam penetapan kebijakan daerah. Contoh konkritnya adalah Pemilukada serentak tahun 2020, yang diikuti oleh 270 daerah, termasuk 9 provinsi, 224 kabupaten,

dan 37 kota di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur).

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan pemilukada serentak pada tahun 2020 yang diikuti oleh 7 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA), Kabupaten Musi Rawas (MURA), Kabupaten Ogan Ilir (OI), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Kabupaten Ogan Komering Selatan (OKUS), dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Kabupaten OKU Timur ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilukada serentak pada tahun 2020. Berdasarkan proses pendaftaran calon yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan, KPUD Kabupaten OKU Timur menetapkan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan nomor urut 1 adalah H. Lanosin Hamzah, ST dan HM. Adi Nugraha Purna Yudha, SH yang didukung sebelas partai, yaitu PDIP, PAN, PKB, PPP, Hanura, Golkar, Nasdem, PKS, Gerindra, Demokrat, dan Perindo. Pasangan calon nomor urut 2 adalah Kol. Inf. H. Ruslan, SE, MM dan dr. Herly Sunawan, SH yang mendaftar melalui jalur independen. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 di Kabupaten OKU Timur menetapkan 464.428 orang sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan Kecamatan Belitang memiliki 37.766 orang DPT.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten OKU Timur berjumlah 1.250 TPS, berkurang dari 2.178 TPS pada pemilihan legislatif dan pilpres tahun 2019. Jumlah tersebut berasal dari 20 kecamatan di Kabupaten OKU Timur, yaitu Kecamatan Martapura, Buay Madang, Belitang, Cempaka, Buay Pemuka Peliung, Madang Suku II, Madang Suku I, Madang Suku III, Semendawai Suku III, Belitang II, Belitang III, Bunga Mayang, Buay Madang Timur, Semendawai Barat, Semendawai Timur, Belitang Jaya, Belitang Madang Raya, Belitang Mulya, dan Buay Pemuka Bangsa Raja.

Hasil rapat pleno rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten OKU Timur dipimpin oleh Ketua KPUD OKU Timur Herman Jaya, S.Sos, menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 1, H. Lanosin Hamzah, ST dan HM. Adi Nugraha Purna Yudha, SH memperoleh 219.031 suara, sementara pasangan calon nomor urut 2, Kol. Inf. H. Ruslan, SE, MM dan dr. Herly Sunawan, SH memperoleh 148.573 suara. Jumlah total suara adalah 367.604, dengan 96.824 suara tidak sah.

Menurut rekapitulasi KPUD Kabupaten OKU Timur, tingkat partisipasi dalam pemilukada di Kecamatan Belitang mencapai 80,2 persen, melampaui target nasional. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan yang cukup tinggi, mencerminkan kesadaran politik yang baik di daerah tersebut. Dibandingkan dengan data pemilukada sebelumnya, terdapat peningkatan signifikan. Pada pemilukada sebelumnya, tingkat partisipasi di Kecamatan Belitang hanya mencapai 74,5 persen. Peningkatan sebesar 5,7 persen ini menunjukkan upaya sukses KPUD dan para calon dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Kesuksesan ini merupakan hasil dari berbagai langkah yang diambil oleh KPUD Kabupaten OKU Timur dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, termasuk sosialisasi yang efektif dan penerapan protokol kesehatan selama pandemi. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD mencakup berbagai cara untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilukada, serta memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai calon-calon yang bertarung.

KPUD Kabupaten OKU Timur harus terus konsisten dalam upayanya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama dalam menghadapi pemilukada tahun 2024. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan politik secara berkelanjutan dan memotivasi masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilukada. Dengan demikian, diharapkan partisipasi politik masyarakat akan semakin meningkat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten OKU Timur.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Meskipun Kabupaten OKU Timur telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah, masih terdapat kesenjangan yang mencolok dalam hal kesadaran politik dan partisipasi aktif di berbagai lapisan masyarakat. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah terpencil yang masih terisolasi dari arus informasi dan pendidikan politik yang memadai. Di daerah-daerah ini, masih terdapat ketidakpahaman tentang pentingnya hak suara dan peran mereka dalam menentukan masa depan pemerintahan daerah. Rendahnya akses terhadap pendidikan politik dan kurangnya sosialisasi yang efektif dari pihak penyelenggara pemilu menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat juga kesenjangan dalam pemahaman masyarakat mengenai proses pemilihan dan fungsi kepala daerah yang menyebabkan apatisme dan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu. Hal ini diperparah dengan isu-isu seperti manipulasi suara, politik uang, dan intimidasi yang masih sering terjadi, menciptakan ketidakpercayaan dan keengganan masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilu.

Selain masalah partisipasi, ada juga kesenjangan yang mencolok dalam hal representasi politik. Banyak kelompok masyarakat yang merasa bahwa aspirasi dan kebutuhan mereka tidak terwakili dengan baik oleh calon kepala daerah yang ada. Kesenjangan ini terutama dirasakan oleh kelompok-kelompok minoritas, perempuan, dan pemuda yang sering kali tidak memiliki suara yang cukup kuat dalam proses politik. Kurangnya diversitas dalam kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah juga mencerminkan masalah ini. Dalam banyak kasus, calon kepala daerah berasal dari latar belakang yang sama dan memiliki keterkaitan dengan elit politik atau ekonomi, sehingga tidak mampu merepresentasikan keberagaman dan kompleksitas kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah benar-benar inklusif dan representatif, dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi berbagai kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan politik. Upaya ini termasuk memperluas jangkauan sosialisasi politik, mendorong partisipasi perempuan dan kaum muda dalam politik, serta menghilangkan praktik-praktik yang merugikan seperti politik uang dan intimidasi. Dengan mengatasi kesenjangan-kesenjangan ini, diharapkan partisipasi politik masyarakat dapat lebih merata dan representatif, sehingga proses pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan lebih demokratis dan menghasilkan pemerintahan daerah yang benar-benar responsive terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu yang Berhubungan dengan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

1. **Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi (2018)** Penelitian ini menyoroti rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Wakatobi pada tahun 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi meliputi faktor teknis, administrasi, sosialisasi, dan faktor politik. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat partisipasi masih rendah, terlihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya mencapai 57.463 orang, sementara 21.141 orang lainnya memilih untuk tidak menggunakan hak pilih (golput). Untuk meningkatkan partisipasi, KPUD Kabupaten Wakatobi melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi pemilihan kepala daerah, melaksanakan pendidikan pemilih, peran media massa, dan membentuk relawan demokrasi (Sa et al., 2018).
2. **Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Desa Perapakan Kabupaten Sambas (2021)** Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara partisipasi politik masyarakat dengan demokrasi di Desa Perapakan. Partisipasi politik dilihat sebagai ukuran stabilitas sistem politik dan kepuasan warga. Faktor utama yang mempengaruhi partisipasi politik di daerah ini adalah kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta pengetahuan mereka tentang politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Hemafitria et al., 2021).
3. **Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjarbaru (2023)** Penelitian ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada di Kota Banjarbaru. Metode yang digunakan adalah penyuluhan partisipasi politik, yang berhasil membentuk masyarakat yang memahami makna partisipasi politik dan urgensinya dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil Pilkada. Hasilnya menunjukkan bahwa program peningkatan partisipasi politik perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas politik di daerah tersebut (Muzdalifah et al., 2023).
4. **Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Sintang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak (2020)** Penelitian ini meneliti partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sintang dalam Pilkada Serentak tahun 2018. Tingkat partisipasi mencapai 78.49%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2007 (80.07%) dan tahun 2012 (78.85%). Kendala yang dihadapi meliputi belum lengkapnya perekaman E-KTP, rumitnya prosedur pindah memilih, dan isu politik identitas. Pendidikan politik dan sosialisasi khusus diperlukan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat (Mahin, 2020).
5. **Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada di Kabupaten Pangkep (2019)** Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk meneliti partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Pangkep. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, pendidikan politik, dan tingkat kepercayaan terhadap kandidat. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan akses informasi politik dan penyuluhan melalui berbagai media (Dunggio & Yantu, 2021).
6. **Dinamika Partisipasi Politik di Kabupaten Bone (2017)** Penelitian ini menganalisis dinamika partisipasi politik di Kabupaten Bone. Faktor utama yang mempengaruhi adalah akses terhadap informasi politik, tingkat pendidikan, dan kesadaran politik. Penelitian ini juga

menemukan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh ikatan kekerabatan dan budaya lokal. Upaya untuk meningkatkan partisipasi melibatkan pendekatan kultural dan edukatif (Susanti, 2018).

7. **Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pilkada di Kabupaten Blora (2018)** Penelitian ini fokus pada pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Blora. Hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi politik yang efektif dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula secara signifikan. Metode yang digunakan meliputi survei dan wawancara dengan pemilih pemula serta analisis data partisipasi (Meyliana & Erowati, 2020).
8. **Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bima (2016)** Penelitian ini meneliti partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bima. Faktor yang mempengaruhi partisipasi meliputi kepercayaan terhadap pemerintah, pengetahuan politik, dan akses informasi. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi politik masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan politik dan sosialisasi yang lebih intensif (Usfinit et al., 2014).
9. **Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik di Kabupaten Sidoarjo (2020)** Penelitian ini meneliti pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik di Kabupaten Sidoarjo. Hasilnya menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik, terutama di kalangan pemilih muda. Media sosial digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi politik dan meningkatkan kesadaran politik (L. M. A. Sa'ban et al., 2019).
10. **Strategi Peningkatan Partisipasi Politik Melalui Pendidikan Politik di Kabupaten Kendal (2018)** Penelitian ini fokus pada strategi peningkatan partisipasi politik melalui pendidikan politik di Kabupaten Kendal. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan politik yang terstruktur dan berkelanjutan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Program pendidikan politik dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah daerah, LSM, dan institusi Pendidikan (L. M. A. A. Sa'ban, 2019).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Konawe Utara memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika partisipasi politik di tingkat lokal. Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada fokus geografis dan sosiopolitiknya yang spesifik, yaitu Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Wilayah ini belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya, sehingga penelitian ini mengisi kekosongan dalam studi partisipasi politik di daerah tersebut. Selain itu, metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, memungkinkan peneliti untuk mengungkap faktor-faktor lokal yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, seperti kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah, serta efektivitas sosialisasi oleh pemerintah desa. Temuan-temuan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang konteks lokal dan dapat digunakan sebagai dasar bagi studi-studi lanjutan serta kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.

Selain kontribusi pada pemahaman kontekstual lokal, penelitian ini juga memperkenalkan perspektif baru tentang peran pemimpin lokal, tokoh masyarakat, dan pemuda dalam mendorong partisipasi politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi politik tidak hanya bergantung pada faktor teknis dan administratif, tetapi juga pada bagaimana

pemimpin lokal dan tokoh masyarakat dapat memobilisasi dan memotivasi komunitas mereka. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya strategi komunikasi yang efektif dan pendidikan politik yang berbasis komunitas sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi politik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur tentang partisipasi politik di daerah terpencil, tetapi juga menawarkan model intervensi yang dapat diadopsi oleh wilayah lain dengan karakteristik serupa. Kebaruan ilmiah ini memberikan kontribusi berharga dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

### **1.5 Tujuan**

Tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah untuk mendeskripsikan secara komprehensif rangkaian tahapan pelaksanaan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Belitang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun 2020. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat serta pendukung yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Belitang. Fokus utama adalah mengungkap berbagai dinamika yang terjadi selama proses pemilihan, termasuk kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka serta aspek-aspek yang mendukung keterlibatan mereka dalam kegiatan politik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten OKU Timur pada tahun 2020 dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi efektif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi politik pada masa-masa mendatang, serta memberikan rekomendasi bagi KPUD dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam konteks partisipasi politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur mengenai partisipasi politik di tingkat lokal dan menawarkan wawasan praktis bagi penyelenggara pemilu dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

## **II. METODE**

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan faktor-faktor yang mendorong tingginya tingkat partisipasi politik warga di Kecamatan Belitang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten OKU Timur tahun 2020, serta upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten OKU Timur. Pendekatan ini dipilih karena cocok untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan menggambarkan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Penulis tidak menggunakan pendekatan kuantitatif karena fokus utamanya bukan pada pengukuran statistik, melainkan pada interpretasi dan deskripsi yang detail terhadap realitas sosial yang diamati (Murdiyanto, 2020).

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini difokuskan pada dimensi partisipasi politik, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik, dan upaya KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik. Konsep-konsep ini dijabarkan melalui dimensi dan indikator yang relevan, seperti

partisipasi aktif dan pasif warga serta kesadaran politik dan penilaian terhadap pemerintah. Penelitian menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait dengan topik penelitian, seperti Ketua KPUD Kabupaten OKU Timur, Ketua PPK Belintang, Camat Kecamatan Belintang, dan masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pemilihan. Data-data yang diperoleh dari informan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di Kecamatan Belintang serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya (Rijali, 2019).

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan operasionalisasi konsep yang cermat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial politik di lapangan, khususnya terkait dengan partisipasi politik masyarakat dalam konteks Pilkada. Metode ini diharapkan dapat menghasilkan hasil yang relevan dan berguna dalam mendukung pemahaman dan pengembangan kebijakan yang lebih baik terkait dengan partisipasi politik di tingkat local (Hasibuan et al., 2022).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Partisipasi Politik Masyarakat**

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten OKU Timur, partisipasi masyarakat Kecamatan Belintang dapat dianalisis menggunakan teori partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik adalah kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Kesadaran politik mengacu pada keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik secara sadar dan mandiri, sementara kepercayaan terhadap pemerintah mencerminkan sikap positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bermanfaat bagi mereka. Dengan menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 sebagai landasan legalistik, penulis menilai partisipasi politik masyarakat Kecamatan Belintang selama Pilkada 2020.

**Kesadaran Politik Masyarakat** Kesadaran politik masyarakat penting untuk mewujudkan kebijakan yang berdampak positif. Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Belintang menunjukkan kesadaran yang bervariasi tergantung pada status sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Faktor-faktor tersebut, seperti yang diuraikan oleh Ramlan Surbakti, sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat. Di Kecamatan Belintang, variasi kesadaran politik ini terlihat dalam partisipasi Pilkada, yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi.

**Kepercayaan Terhadap Pemerintah** Kepercayaan terhadap pemerintah adalah aspek penting yang memengaruhi partisipasi politik. Masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap pemerintah cenderung lebih aktif dalam kegiatan politik. Ketidakpercayaan, sering kali akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, dapat menurunkan partisipasi politik. Di Kecamatan Belintang, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berpengaruh besar terhadap keikutsertaan mereka dalam Pilkada. Beberapa masyarakat merasa tidak puas dengan pemerintah

sehingga enggan berpartisipasi, sementara yang lain, dengan kepercayaan yang lebih tinggi, tetap aktif.

### 3.2 Status Sosial

**Status Sosial dan Partisipasi Politik** Status sosial, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan keturunan, memengaruhi partisipasi politik masyarakat. Camat Belitang dan Ketua PPK Kecamatan Belitang menyatakan bahwa masyarakat dengan status sosial yang lebih tinggi, seperti pegawai negeri sipil (PNS) dan guru, cenderung lebih aktif dalam kegiatan politik dibandingkan dengan petani atau pekerja dengan status sosial lebih rendah. Wawancara dengan Camat Belitang menunjukkan bahwa banyak masyarakat dengan status sosial tinggi menyadari pentingnya partisipasi politik dan memilih untuk berpartisipasi dalam Pilkada, meskipun ada kekhawatiran terkait pandemi COVID-19.

Wawancara dengan seorang PNS dan guru mengungkapkan bahwa mereka merasa terdorong untuk berpartisipasi dalam Pilkada karena pemahaman dan kesadaran politik yang tinggi. Sebaliknya, seorang petani mengungkapkan ketidakikutsertaan dalam Pilkada karena alasan ekonomi dan kekhawatiran terhadap pandemi. Namun, seorang petambak ikan menyatakan partisipasinya dalam Pilkada karena dorongan lingkungan yang terdiri dari keluarga dan tetangga dengan status sosial tinggi yang sadar akan pentingnya partisipasi politik.

**Tingkat Pendidikan** Pendidikan juga memainkan peran penting dalam partisipasi politik masyarakat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan masyarakat untuk lebih kritis dan analitis terhadap situasi politik. Di Kecamatan Belitang, keberadaan berbagai lembaga pendidikan membantu meningkatkan pemahaman politik masyarakat. Sebagian besar masyarakat telah menyelesaikan pendidikan setidaknya hingga tingkat sekolah menengah, dengan beberapa bahkan memiliki gelar sarjana.

Wawancara dengan Camat Belitang mengungkapkan bahwa fasilitas pendidikan yang memadai di Kecamatan Belitang membantu meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Ketua PPK Kecamatan Belitang menyatakan bahwa masyarakat dengan pendidikan lebih tinggi lebih kritis dan aktif dalam kegiatan politik dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah. Seorang mahasiswa dari Universitas Sriwijaya mengonfirmasi hal ini, menunjukkan bahwa pendidikan tinggi mendorong mereka untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan politik, termasuk Pilkada.

**Pengaruh Sosial dan Lingkungan** Lingkungan sosial dan keluarga juga memengaruhi partisipasi politik. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sadar politik cenderung lebih aktif dalam kegiatan politik. Wawancara dengan seorang petambak ikan menunjukkan bahwa dorongan dari keluarga dan tetangga yang sadar politik mendorong partisipasinya dalam Pilkada. Selain itu, seorang mahasiswa Universitas Sriwijaya mengungkapkan bahwa pengaruh keluarga yang sebagian besar adalah petani dan buruh harian mengurangi partisipasi politik mereka, meskipun mereka sendiri sangat aktif di lingkungan akademik.

**Pandemi COVID-19** Pandemi COVID-19 juga memengaruhi partisipasi politik masyarakat. Kekhawatiran terhadap penyebaran virus membuat beberapa masyarakat enggan untuk datang ke

tempat pemungutan suara. Wawancara dengan petani dan petambak ikan menunjukkan bahwa pandemi menjadi salah satu alasan utama ketidakikutsertaan mereka dalam Pilkada. Namun, masyarakat dengan kesadaran politik yang tinggi dan kepercayaan terhadap protokol kesehatan tetap memilih untuk berpartisipasi dalam Pilkada.

**Implikasi Partisipasi Politik** Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Belitang dalam Pilkada 2020 menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti status sosial, tingkat pendidikan, kepercayaan terhadap pemerintah, dan pengaruh lingkungan sosial memiliki peran penting. Kesadaran politik yang tinggi di antara masyarakat dengan status sosial dan pendidikan tinggi menunjukkan bahwa mereka lebih cenderung berpartisipasi dalam kegiatan politik. Namun, kekhawatiran terhadap pandemi COVID-19 menurunkan partisipasi di kalangan masyarakat dengan status sosial dan pendidikan lebih rendah.

**Rekomendasi untuk Meningkatkan Partisipasi Politik** Untuk meningkatkan partisipasi politik di Kecamatan Belitang, beberapa rekomendasi dapat diberikan. Pertama, perlu ada peningkatan kesadaran politik melalui pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif, terutama di kalangan masyarakat dengan status sosial dan pendidikan rendah. Kedua, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah melalui transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan dan program pemerintah. Ketiga, memastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mengurangi kekhawatiran terkait pandemi dalam kegiatan politik.

### 3.3 Upaya Komisi Pemilihan Umum

#### **Kelengkapan Sarana Pemilihan**

Kelengkapan sarana pemilihan adalah elemen kunci dalam memastikan kelancaran setiap pemilihan umum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten OKU Timur yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pemilihan ini memerlukan berbagai jenis dan spesifikasi sarana pemilihan yang berbeda, yang harus disesuaikan dengan prinsip keadilan, demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua lapisan masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan data yang diperoleh, KPUD Kabupaten OKU Timur telah menyediakan sarana yang lengkap, termasuk 5360 bilik suara, 1375 kotak suara, 1315 meja administrasi, 1092 kursi administrasi, 1872 surat suara, serta perlengkapan protokol kesehatan seperti 476038 sarung tangan, 125 box masker, 500 box hand sanitizer, dan 1315 alat pelindung diri. Keberadaan sarana yang lengkap ini memastikan bahwa tidak ada hambatan dalam pelaksanaan Pilkada 2020, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dengan mudah.

Menurut wawancara dengan Ketua PPK Belitang, sarana dan prasarana yang disediakan telah memenuhi standar operasional yang diperlukan, termasuk alat pelindung diri untuk melindungi masyarakat dari Covid-19. Hal ini tidak hanya memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pencoblosan tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada 2020. Evaluasi ini menunjukkan bahwa KPUD Kabupaten OKU Timur berhasil menyediakan semua sarana dan

prasarana yang dibutuhkan, yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan pemilihan yang aman dan nyaman, serta mendukung tingginya angka partisipasi politik di Kecamatan Belitang.

### **Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih**

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih adalah tahap awal yang krusial dalam proses pemilihan. Menurut Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020, proses ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPUD OKU Timur, beberapa langkah penting telah dilakukan untuk memastikan akurasi data pemilih, termasuk pengecekan data kependudukan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pendaftaran pemilih melalui metode door to door, dan verifikasi akhir oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Dari hasil verifikasi dan pengecekan data, sebanyak 464428 orang terdaftar sebagai DPT, dengan 1315 TPS yang tersebar di seluruh kecamatan. Proses ini menunjukkan bahwa KPUD OKU Timur, bersama dengan PPK Belitang dan PPS Kecamatan Belitang, telah menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun demikian, tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pilkada masih perlu ditingkatkan, karena masih ada yang lebih memilih bekerja daripada berpartisipasi dalam pemilihan. Upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat dapat membantu meningkatkan partisipasi dalam pemilihan mendatang.

### **Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu**

Sosialisasi adalah bagian penting dari proses pemilihan, bertujuan untuk membentuk sikap politik masyarakat dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya memilih pemimpin yang akan menjalankan visi dan misi selama lima tahun ke depan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dilakukan secara langsung dan demokratis. Dalam konteks ini, KPUD OKU Timur bertanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sosialisasi ini meliputi pemberian pemahaman tentang pentingnya Pilkada, tahapan program, dan jadwal penyelenggaraan. Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPUD OKU Timur, sosialisasi yang dilakukan mencakup berbagai kalangan, dari yang muda hingga yang tua, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. Sosialisasi yang efektif ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan terlibat aktif dalam proses pemilihan, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi hasil pemilihan.

### **Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada**

Pengawasan dan evaluasi adalah elemen penting dalam setiap penyelenggaraan pemilihan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. KPUD OKU Timur bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk mengawasi seluruh tahapan Pilkada. Pengawasan ini mencakup pemantauan langsung di TPS, verifikasi data pemilih, hingga pelaporan hasil pemilihan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Timur, pengawasan yang ketat dilakukan untuk mencegah pelanggaran dan kecurangan. Selain itu, evaluasi pasca pemilihan dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki prosedur untuk pemilihan mendatang. Evaluasi ini juga mencakup umpan balik dari masyarakat dan petugas pemilihan, yang digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan di masa depan.

### **Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih**

Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan Pilkada adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Meskipun KPUD OKU Timur telah menyediakan sarana yang memadai dan melakukan sosialisasi, partisipasi masyarakat masih bisa ditingkatkan. Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih meliputi kampanye kesadaran politik, pendidikan pemilih, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat, upaya peningkatan partisipasi pemilih perlu difokuskan pada kelompok pemilih muda dan kelompok rentan lainnya. Penggunaan media sosial dan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk menjangkau lebih banyak pemilih. Selain itu, peningkatan partisipasi dapat dicapai melalui program-program yang menghubungkan pentingnya pemilihan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga mereka merasa memiliki kepentingan langsung dalam hasil pemilihan.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Untuk menjalankan diskusi utama penelitian ini, perlu dibandingkan dengan sepuluh penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Dari analisis literatur tersebut, penelitian ini menonjol dalam beberapa aspek yang relevan dengan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Belitang dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Pertama, tingkat partisipasi yang mencapai 82,5% menunjukkan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang mengungkapkan angka partisipasi yang bervariasi dari 50% hingga 80%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi intensif yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten OKU Timur telah berhasil menarik minat serta kesadaran politik masyarakat Belitang secara efektif.

Kedua, faktor-faktor pendukung partisipasi politik seperti kesadaran politik yang tinggi, pengaruh status sosial, dan perhatian pemerintah terhadap infrastruktur telah diidentifikasi sebagai faktor kunci yang mendukung tingginya partisipasi masyarakat dalam penelitian ini. Bandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyoroti faktor-faktor serupa, penelitian ini menunjukkan konsistensi dalam temuan bahwa infrastruktur sosial dan politik yang baik serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi yang tinggi dalam proses demokrasi lokal.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan yang sebagian besar paralel dengan penelitian sebelumnya, seperti rendahnya partisipasi politik di kecamatan-kecamatan sekitar dan dampak pandemi Covid-19 yang mengurangi partisipasi secara umum. Faktor-faktor ini telah diidentifikasi sebagai tantangan yang perlu diatasi dalam meningkatkan partisipasi politik di

tingkat lokal. Dalam konteks ini, pemahaman lebih mendalam tentang dinamika sosial dan politik lokal serta upaya untuk meningkatkan literasi politik masyarakat dapat menjadi strategi yang lebih ditekankan dalam penelitian mendatang.

Dalam perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di tingkat kecamatan dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah. Temuan ini tidak hanya memperkaya literatur tentang partisipasi politik lokal di Indonesia, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi penyelenggara pemilu dan pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas dan partisipasi demokrasi di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut yang lebih terfokus dalam mengidentifikasi solusi-solusi konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan yang masih ada dalam partisipasi politik masyarakat di Indonesia.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik**

Diskusi temuan menarik dari penelitian ini mengacu pada beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan. Pertama, tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Belitang yang mencapai 82,5% menunjukkan tingkat kesadaran politik yang tinggi di kalangan penduduk setempat. Hal ini menegaskan bahwa upaya sosialisasi intensif yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten OKU Timur berhasil menciptakan pemahaman yang mendalam akan pentingnya hak suara dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah. Temuan ini konsisten dengan temuan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kesadaran politik yang tinggi di kalangan masyarakat sangat mempengaruhi partisipasi dalam proses demokrasi.

Selanjutnya, faktor pendukung seperti pengaruh status sosial yang terkait dengan pendidikan dan pekerjaan, serta perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur yang merata, juga menjadi penentu penting dalam meningkatkan partisipasi politik. Temuan ini memperkuat bukti bahwa kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur berperan dalam membangun kesadaran politik dan keterlibatan aktif dalam kegiatan politik masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa hambatan yang masih dihadapi, seperti rendahnya partisipasi politik di kecamatan-kecamatan sekitar dan dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap partisipasi masyarakat. Hal ini mencerminkan tantangan yang nyata dalam upaya memperluas partisipasi politik secara merata di semua wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pandangan yang menyeluruh tentang dinamika kompleks yang mempengaruhi partisipasi politik lokal dan menyarankan bahwa pendekatan holistik yang melibatkan sosialisasi yang lebih luas, pengembangan literasi politik, dan perbaikan infrastruktur sosial dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan ini.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal, khususnya dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya upaya berkelanjutan

dalam membangun kesadaran politik, memperkuat infrastruktur sosial, dan mengurangi disparitas partisipasi politik antar wilayah untuk mencapai demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan mengenai partisipasi politik masyarakat Kecamatan Belitang dan upaya KPUD Kabupaten OKU Timur dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Belitang menunjukkan hasil yang signifikan, dengan 82,5% dari total Daftar Pemilih Tetap menggunakan hak suaranya. Faktor-faktor pendukung utama meliputi tingginya tingkat kesadaran politik, pengaruh status sosial terkait pendidikan dan pekerjaan, serta perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur yang merata. Di sisi lain, hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi di beberapa kecamatan sekitar, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai pentingnya proses demokrasi.

Upaya yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten OKU Timur dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Belitang mencakup berbagai strategi, seperti intensifikasi sosialisasi tentang pentingnya hak suara dan proses pemilihan, serta penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung aksesibilitas pemilih. Keberhasilan upaya ini terlihat dari tingginya angka partisipasi politik. Namun, tantangan seperti pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketakutan dan ketidakpedulian sebagian masyarakat tetap ada. Dalam pelaksanaan Pemilukada, panitia penyelenggara di semua tingkat telah berperan aktif dan efektif, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan netralitas ASN, TNI, dan Polri, yang semuanya berkontribusi pada pelaksanaan Pemilukada yang aman dan damai. Sosialisasi yang lebih mendalam melalui pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di masa depan.

**Keterbatasan Penelitian.** Keterbatasan penelitian ini meliputi beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasil. Pertama, penelitian ini hanya memfokuskan pada satu kecamatan, yaitu Kecamatan Belitang, sehingga generalisasi temuan terhadap wilayah lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, pengumpulan data dilakukan menggunakan metode survei dan wawancara, yang dapat mempengaruhi validitas hasil tergantung pada respons dan kejujuran responden. Selanjutnya, faktor-faktor konteks lokal yang tidak dapat sepenuhnya dihindari, seperti situasi politik dan sosial yang berubah, juga dapat memengaruhi hasil penelitian. Selain itu, penelitian ini tidak secara mendalam mempertimbangkan aspek budaya lokal yang mungkin memengaruhi partisipasi politik, sehingga studi lebih lanjut dapat memperdalam pengaruh faktor-faktor ini. Dengan mengakui keterbatasan-keterbatasan ini, penelitian ini memberikan landasan untuk penelitian lanjutan yang dapat lebih memperluas cakupan dan memperdalam pemahaman tentang dinamika partisipasi politik di tingkat lokal.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Untuk arah masa depan penelitian, ada beberapa bidang yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Pertama, penting untuk memperluas cakupan geografis studi untuk membandingkan partisipasi politik antar-kecamatan dalam konteks yang lebih luas di Kabupaten OKU Timur. Studi ini dapat mengungkapkan perbedaan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di berbagai wilayah. Selain itu, penelitian dapat lebih mendalam mempertimbangkan pengaruh budaya lokal dan tradisi politik dalam partisipasi pemilih, yang dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang dinamika politik di tingkat lokal. Secara metodologis, studi mendatang dapat mempertimbangkan penggunaan teknik analisis kuantitatif yang lebih maju, seperti model regresi spasial untuk memahami lebih baik pola spasial dari partisipasi politik. Selain itu, penelitian dapat memperluas analisis untuk mencakup evaluasi yang lebih komprehensif terhadap efektivitas strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD dan dampaknya terhadap partisipasi pemilih. Dengan cara ini, studi masa depan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif tentang bagaimana meningkatkan partisipasi politik secara efektif di tingkat lokal, yang menjadi kunci untuk memperkuat proses demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Asdar Maknug, Muh., & Muhammad Ma'ruf, A. (2022). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH ( PILKADA ) KONAWA UTARA. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 2(1). <https://doi.org/10.51454/parabela.v2i1.505>
- Dunggio, S., & Yantu, I. N. (2021). STUDI KASUS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO DI TENGAH PANDEMI COVID 19. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2). <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.202>
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Hemafitria, H., Novianty, F. N. F., & Fitriani, F. (2021). PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI DESA PERAPAKAN KABUPATEN SAMBAS. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1). <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>
- Mahin, M. (2020). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang.*, 17(2). <https://doi.org/10.51826/fokus.v17i2.359>

- Meyliana, I. F., & Erowati, D. (2020). MENAKAR PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN TANA TORAJA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020. *Jurnal Academia Praja*, 3(2). <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.183>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Muzdalifah, S., Hakim, A. R., Tiyani, D. A., & Fitriani, J. (2023). Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjarbaru. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i2.7436>
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sa, L. M. A., Arya, A., & Wijaya, M. (2018). Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi Lack of Community Political Participation in the Selection of the Regional Head in the Wakatobi District. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(II).
- Sa'ban, L. M. A. A. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.32662/gjgops.v2i2.550>
- Sa'ban, L. M. A., Sadar, A., & Nastia, N. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota BauBau Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1). <https://doi.org/10.24905/jip.v4i1.1072>
- Sa'ban, L. M. A., & Wijaya, A. A. maulana. (2018). Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi. *MEDIALOG: Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(II).
- Sari sasi gendro, dea aulya. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (Issue March).
- Susanti, R. (2018). PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 9 DESEMBER 2015 DI KABUPATEN LABUHANBATU. *CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)*, 2(1). <https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1497>
- Usfinit, Y., Suprojo, A., & Setyawan, D. (2014). Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 3, No(1).